

Thematic Report Vol. 1

Jalan Panjang Medan Menuju Kota Toleran:

Studi Laporan Indeks Kota Toleran SETARA Institute

Penulis

Irfan L. Sarhindi
Zainuddin Abuhamid
Surya Adi Sahfutra
Muhammad Irfan
Sayyida Faradiba

Editor

Irfan L. Sarhindi

Thematic Report Vol. 1

Jalan Panjang Medan Menuju Kota Toleran: Studi Laporan Indeks Kota Toleran SETARA Institute

Penulis:

Irfan L. Sarhindi
Zainuddin Abuhamid
Surya Adi Sahfutra
Muhammad Irfan
Sayyida Faradiba

Editor:

Irfan L. Sarhindi

Penerbit:

Centre for Inclusivity, Interfaith and Multicultural Studies
Universitas Satya Terra Bhinneka
Jl. Sunggal Gg. Bakul, Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
20128
Email : cims@satyatterrabhinneka.ac.id
Website : cims.satyatterrabhinneka.ac.id

Kata Pengantar

Pembaca yang budiman,

Centre for Inclusivity, Interfaith and Multicultural Studies merupakan lembaga riset di bawah naungan Universitas Satya Terra Bhinneka Medan yang fokus dalam melakukan kajian mengenai isu inklusivitas, hubungan lintas agama dan lintas budaya. Misi tersebut kami manifestasikan dalam berbagai program, seperti pengembangan mata kuliah Inklusivitas dan Religiusitas di Universitas Satya Terra Bhinneka, pengadaan seminar dan kuliah umum, hingga penyusunan laporan tematik. Laporan tematik sendiri kami rilis selama empat bulan sekali, dengan mengusung tema yang berbeda namun masih dalam lingkup inklusivitas.

Adapun laporan tematik pertama yang kami susun mengusung tema “Jalan Panjang Medan Menuju Kota Toleran: Studi Laporan Indeks Kota Toleran SETARA Institute”. Laporan ini secara khusus mengkaji perkembangan Kota Medan dalam laporan Indeks Kota Toleran yang dirilis setiap tahunnya oleh SETARA Institute. Selain itu, studi ini juga menganalisis faktor yang memengaruhi naik turunnya kota Medan dalam peringkat kota toleran. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sejumlah rekomendasi yang kami sampaikan kepada berbagai lapisan stakeholders dalam rangka mewujudkan Kota Medan yang lebih inklusif dan toleran.

Kami berharap melalui kajian yang kami susun ini dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah Kota Medan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang mempromosikan toleransi di Kota Medan. Selain itu, kami juga berharap melalui tulisan ini masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan Masyarakat yang inklusif dan toleran.

Terakhir, kami juga menyadari tulisan kami tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, kami terbuka terhadap berbagai masukan konstruktif dari pembaca untuk peningkatan kualitas tulisan kami kedepannya.

Selamat membaca.

Direktur Centre for Inclusivity, Interfaith and Multicultural Studies,
Irfan L. Sarhindi

Jalan Panjang Medan Menuju Kota Toleran: Studi Laporan Indeks Kota Toleran SETARA Institute

Pendahuluan: Medan itu Madani atau Intoleran?

Sebagai kota metropolitan terbesar di Pulau Sumatera sekaligus kota terbesar ketiga di Indonesia ([Pusat Jurnal Ilmiah Internasional, 2022](#)), Medan telah lama dikenal sebagai kota yang multikultural. Letaknya yang strategis menjadikannya sebagai *'melting pot'* beragam etnis dan ras, menciptakan sebuah potret keragaman sosial yang khas. Medan secara demografi menjadi rumah bagi berbagai etnis seperti Batak, Jawa, Melayu, Tionghoa, serta komunitas lainnya ([Damanik, 2024](#)). Tidak hanya kaya akan budaya, keberagaman Medan juga terlihat jelas dari keragaman agama yang dianut penduduknya. Meski mayoritas penduduk kota Medan memeluk agama Islam (terbesar di 19 kecamatan), pemeluk agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu juga tersebar merata di berbagai kecamatan di Kota Medan ([Mukmin & Damanik, 2018](#)). Masjid, gereja, vihara, kelenteng, dan kuil berdiri berdampingan di berbagai sudut kota, menjadi simbol nyata pluralitas kehidupan beragama di Medan.

Di sisi lain, catatan-catatan kasus intoleransi yang beberapa kali terjadi turut mencoreng kehidupan harmonis di Kota Medan. Misalnya, pada tahun 2023 silam, terjadi pembubaran jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di Medan Marelan, menjadi salah satu contoh kasus intoleransi yang kerap terjadi di Medan ([Tribun Medan, 2023](#)). Pertanyaannya: bagaimana sebetulnya koeksistensi masyarakat multikultur dan multiagama di Medan? Sejauh mana toleransi terwujud di kota Medan? Studi ini mencoba memotret dinamika toleransi di kota Medan pada kurun 2015–2024. Dengan menggunakan studi Indeks Kota Toleran (IKT) yang dirilis oleh SETARA Institute sebagai basis data utama, studi ini mencoba menganalisis perjalanan kota Medan menuju kota toleran.

Dalam menjabarkan hasil analisis tersebut, kami akan mulai dengan menjabarkan hasil telaah kami mengenai ranking IKT Medan berdasarkan hasil survey SETARA Institute. Kemudian, kami akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai kompleksitas konsep toleransi dan sejauh mana kompleksitas tersebut terwakili (ataupun tidak) oleh studi IKT SETARA Institute. Berangkat dari pemahaman mengenai kompleksitas toleransi dan limitasi studi SETARA Institute, kami akan membahas lebih lanjut mengenai dua aspek utama dari indikator toleransi yang digunakan oleh SETARA Institute: (a) peran Pemerintah dan (b) peran publik serta lembaga sosial-keagamaan. *Thematic report* ini kemudian akan ditutup dengan uraian rekomendasi dan kesimpulan.

Temuan SETARA: Bagaimana Ranking Toleransi Medan 2015–2024?

Sebelum lebih jauh membahas mengenai perkembangan IKT kota Medan, penting untuk memahami bagaimana kota toleran didefinisikan dan diukur. Menurut SETARA Institute (2024), kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan yang inklusif, regulasi yang mendukung implementasi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang responsif dalam mempromosikan toleransi, tingkat pelanggaran kebebasan beragama yang rendah, serta upaya berkelanjutan dalam pengelolaan keberagaman dan inklusi sosial. Studi ini mengadopsi kerangka Grim dan Finke (SETARA, 2023), yang mengukur keberagaman berdasarkan tiga variabel, yaitu pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama tertentu, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama, serta regulasi sosial yang membatasi kebebasan agama. Kemudian, SETARA Institute menambahkan variabel demografi sosio-keagamaan, mempertimbangkan heterogenitas komposisi penduduk di Indonesia. Dengan demikian, SETARA Institute menetapkan 4 variabel yang kemudian diturunkan ke dalam 8 indikator sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini.

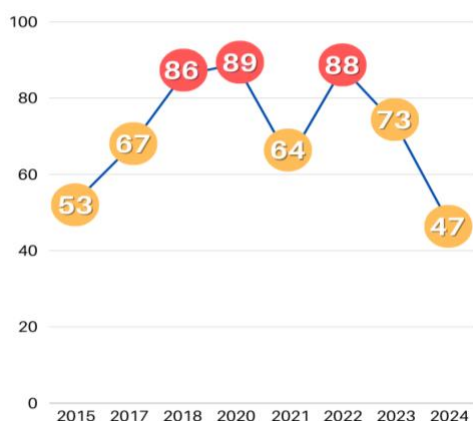
Tabel 1.1 Variabel dan Indikator Indeks Kota Toleran

Variabel	Indikator	
Regulasi pemerintah kota	Rencana pembangunan (RPJMD) dan produk hukum lainnya	Ada tidaknya kebijakan diskriminatif
Regulasi sosial	Peristiwa intoleransi	Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi
Tindakan pemerintah	Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi	Tindakan nyata terkait isu toleransi,
Demografi sosio-keagamaan	Heterogenitas keagamaan penduduk	Inklusi sosial keagamaan.

Kami merangkum tren kota Medan dalam laporan IKT SETARA dari tahun 2015 sampai 2024. Berdasarkan grafik tersebut, kota Medan tercatat tiga kali masuk dalam 10 besar kota terendah, yaitu pada peringkat 86 (2018), 89 (2020), dan 88 (2022). Di sisi lain, kota Medan juga mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2024, yaitu pada peringkat 47, mencatat peringkat tertinggi yang pernah diraih. Tren fluktuatif ini menunjukkan adanya dinamika serius dalam tata kelola toleransi di Kota Medan. Naik-turunnya peringkat Kota Medan tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat dalam membina kehidupan yang toleran. Kenaikan indeks toleransi di tahun 2023, misalnya, menurut SETARA Institute, disebabkan dengan kebijakan pemerintah kota yang mulai lebih inklusif, serta meningkatnya ruang-

ruang dialog antarumat beragama. Salah satu terobosan penting adalah hadirnya Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang dinilai sebagai bentuk pelebagaan upaya pemajuan toleransi. Selain itu, dukungan anggaran yang proporsional bagi kelompok keagamaan juga menjadi faktor pendorong. Sebaliknya, SETARA Institute menyebut peringkat buruk yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2018, 2020, dan 2022, banyak dipengaruhi oleh maraknya kasus intoleransi yang tidak ditangani secara tuntas, seperti persoalan izin pendirian rumah ibadah yang terus menjadi sumber konflik di masyarakat.

**Tren Peringkat IKT Kota Medan
2015-2024**



Gambar 1.1 Tren Peringkat IKT Kota Medan 2015-2024

Lebih Luas Mengenai Toleransi: Kompleksitas dan Indikator

Toleransi merupakan sebuah konsep yang kompleks, kontekstual, dan

multifaset. Ia diterjemahkan sebagai sikap sosial terhadap keberagaman ([Buitrago et al., 2019](#)), sikap yang mendukung pemenuhan hak kewarganegaraan yang dijamin konstitusi ([Wahid Institute & LSI, 2018](#)), dilekatkan dengan kohesi sosial ([RSiS, 2025](#)), serta kerap ‘dipertentangkan’ dengan radikalisme ([seperti dalam Saputra, 2018; Muzakki, 2014; Wahid Foundation & LSI, 2018](#)). Dalam studi SETARA Institute, toleransi yang diukur bersifat makro sehingga, jika kita klasifikasikan dimensi pengukurannya, kita akan melihat dua fokus utama: (a) kebijakan dan tindakan pemerintah serta (b) dinamika sosial masyarakat. Data diambil terutama bersifat sekunder, seperti data dari BPS hingga konten berita di media-media pilihan, dan ditunjang dengan *self-assessment* yang diisi oleh masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten. Untuk menjaga validitas, data kemudian di-triangulasi dengan melibatkan ahli.

Namun begitu, beberapa hal luput dijelaskan dalam laporan IKT yang sudah SETARA terbitkan. Pertama, tidak tersedianya pertanyaan pemandu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, sehingga sulit bagi kami melacak area mana saja—dari setiap indikator—yang di-cover. Kedua, beberapa indikator bersifat mengukur jumlah atau kuantifikasi, seperti (a) jumlah kebijakan diskriminatif, (b) jumlah partisipasi masyarakat dalam praktik toleransi, (c) jumlah peristiwa intoleransi.

Namun begitu, tidak tersedia matriks penilaian sebagai panduan dalam memberikan *scoring*. Ketiga, SETARA Institute menambahkan satu dimensi mengenai heterogenitas masyarakat sebagai upaya kontekstualisasi atas teori [Grim & Finke \(2006\)](#) untuk memotret kekhasan Indonesia. Namun, penjelasan mengenai korelasi antara heterogenitas dengan *scoring* level toleransinya kurang jelas disebutkan. Pada laporan [IKT 2023 \(2024\)](#), persoalan heterogenitas ini disinggung dengan menyebutkan bahwa semakin heterogen, semakin sulit mengelola toleransi. Pertanyaannya kemudian: bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses *scoring*? Apakah ada perbedaan pembobotan saat menilai dinamika sosial di kota yang homogen dan heterogen? Jika iya, bagaimana mengkategorisasi level homogenitas dan heterogenitas?

Tentu saja *gap* dan limitasi di atas tidak mengurangi instrumentalitas laporan IKT SETARA Institute. Melainkan menunjukkan bagaimana kompleks, multifaset, dan dinamisnya isu toleransi. Dengan demikian, penting untuk melihat laporan IKT SETARA Institute ini sebagai salah satu ikhtiar konstruktif, sambil tetap menyadari ruang-ruang yang belum tereksplorasi dalam diskursus toleransi, terutama yang bersifat mikro. Misal: dengan mempertimbangkan keberagaman sosiokultural, etnis, dan agama di Indonesia, kita dapat membagi

toleransi ke dalam (a) toleransi sosio-kultur dan (b) toleransi agama. Dalam toleransi sosio-kultur, kita misalnya, dapat menggunakan *framework* kohesi sosial dari [S. Rajaratnam School of International Studies \(RSIS\) \(2025\)](#) yang terdiri atas (i) relasi sosial, (ii) keterhubungan, dan (iii) fokus pada kemaslahatan bersama. Sedangkan dalam toleransi agama, kita bisa mengadaptasi indikator yang digunakan oleh PPIM UIN Jakarta ([Saputra, 2018](#)): (i) opini toleran terhadap orang dari agama yang sama, (ii) tindakan toleran terhadap orang dari agama yang sama, (iii) opini toleran terhadap umat agama lain, (iv) tindakan intoleran terhadap umat agama lain.

Dengan menyadari kompleksitas dan ruang-ruang diskusi yang dinamis tersebut, kita bisa melihat persoalan toleransi, dan implementasinya di suatu ruang sosial, secara lebih komprehensif.

Peran Pemerintah: Regulasi dan Tindakan

Pemerintah pada prinsipnya adalah regulator sekaligus fasilitator tata kelola kehidupan masyarakat, dengan output berupa regulasi dan tindakan. Dalam menjalankan tugas tersebut, pemerintah harus memiliki 'sensitivitas', perspektif dan/atau paradigma pembangunan yang memperhatikan aspek keberagaman, inklusi sosial, dan multikulturalisme. Dalam hal ini, pemerintah berdialektika dengan

aktor sosial lain yang turut mewarnai konstruksi suatu tatanan masyarakat. Kota Medan, misalnya, terbentuk atas hasil interaksi dari berbagai entitas sosial, hal itu yang kemudian mengkonstruksi 'wajah' kota.

Kondisi sosiologis yang demikian menuntut regulasi yang peka terhadap situasi dan kondisi. Kami mencatat setidaknya ada beberapa regulasi yang mengindikasikan kepekaan atau sensitivitas atas keberagaman tersebut, seperti Peraturan Walikota Medan Nomor 17 tahun 2021 tentang pemberian dana jasa pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada pelayan masyarakat khususnya yang berusia di atas 60 tahun, seperti bilal jenazah, penggali kubur, pengurus rumah ibadah, guru maghrib mengaji, guru sekolah minggu, guru sekolah Hindu-Buddha dan Konghucu, penatua gereja, serta petugas Gereja Katolik.

Perwal tersebut meskipun tidak menegaskan terkait kebijakan toleransi, namun mengandung kesadaran tentang keberagaman yang inklusif. Kesadaran regulatoris seperti ini menjadi penting mengingat komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, apapun latar belakang identitas kultural maupun agamanya. Fasilitasi terhadap isu kerukunan dan toleransi sudah dilakukan, walau masih bersifat birokratis. Contohnya, alokasi pembiayaan yang berasal dari APBD

untuk lembaga seperti FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan pembiayaan dari Pemko Medan untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Hal ini didorong oleh adanya hirarki aturan yang mengamankan 'political budgeting' untuk lembaga tersebut. Dalam konteks FPK, fasilitasi didorong oleh regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan berbasis fasilitasi kegiatan juga dilakukan pada level praktis. Beberapa skema pembiayaan kegiatan dari beberapa pos anggaran sering muncul dengan kata kunci, toleransi, keragaman dan dialog antar umat beragama. Walaupun kadang muncul dalam konteks suasana tertentu, misalnya menjelang pemilu. Kegiatan seperti ini memiliki kecenderungan memfasilitasi kelompok keagamaan yang elitis, seperti pengurus lembaga keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sejenisnya. Topik yang dibahas juga sering tidak memotret masalah toleransi, kerukunan yang ada di kota Medan secara multiperspektif, sehingga wacana yang dibahas juga parsial tidak menyentuh akar persoalan dasar.

Hal tersebut menjadi PR yang mendasar, dan tidak selalu dapat terekam oleh survey ala SETARA Institute: bahwa keberadaan kebijakan dan penganggaran belum tentu menjamin terwujudnya toleransi. Kita belajar bagaimana

antara kebijakan dan penganggaran dengan implementasi selalu ada *gap* karena berbagai faktor seperti kompleksitas isu, pertimbangan politik, kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa persoalan toleransi juga menyangkut paradigma pembangunan yang inklusif, yang mendukung terbangunnya ekosistem masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati dan begitu seterusnya.

Peran Publik dan Institusi Sosial-Pendidikan dan Keagamaan

Salah satu lembaga yang disoroti oleh SETARA Institute dalam menciptakan suasana rukun dan toleran di Kota Medan ialah peran FKUB Kota Medan. Sejak dibentuk pada tahun 2007, FKUB Kota Medan telah berperan aktif menciptakan kerukunan dan kondusifitas kehidupan keberagamaan di Kota Medan. Ia menjadi (a) wadah bertemunya tokoh-tokoh agama, (b) menjadi jembatan komunikasi dan dialog antar umat beragama, (c) mendorong partisipasi masyarakat sipil untuk mewujudkan kerukunan dan toleransi melalui sosialisasi dan edukasi, serta (d) membangun jejaring dengan berbagai organisasi sipil, kelompok atau organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penggunaan narasi agama dalam konflik sosial.

Hal yang patut disoroti dan diapresiasi dari peran FKUB dalam menciptakan kerukunan dan toleransi adalah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik. Misalnya lembaga ini telah beberapa kali memediasi sengketa atau kesalahpahaman terkait isu-isu keagamaan, seperti pendirian, renovasi, dan penggusuran rumah ibadah yang terjadi di beberapa titik di Kota Medan (Arifinsyah, 2013:111). Namun begitu, meskipun FKUB memiliki peran penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Medan, ada beberapa lembaga sosial kemasyarakatan yang juga tidak kalah penting. Pertama, institusi/organisasi keagamaan lainnya serta pemuka agama juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebaliknya, mereka inilah agen-agen di “akar rumput” yang secara langsung berinteraksi dengan umat (masyarakat). Pelembagaan otoritas dan diseminasi pengetahuan/identitas melalui lembaga pendidikan yang mereka kelola dapat menjangkau lapisan-lapisan masyarakat, yang selanjutnya mendorong proses internalisasi dan vernakulasi cara pandang sosial-keagamaan yang inklusif dan toleran.

Kedua, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki konsen terhadap isu-isu kerukunan dan toleransi, yang perannya tidak kalah penting. Sebut saja ASB (Aliansi Sumut Bersatu), LBH Medan, dan organisasi sejenisnya. Mereka secara

independen aktif mengkampanyekan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, memberikan advokasi dan perlindungan terhadap korban kekerasan dan intoleransi, memediasi konflik terkait isu keberagamaan, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang inklusif dan non-diskriminasi.

Ketiga, lembaga/institusi pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan [Wexler \(2009\)](#), institusi pendidikan bertujuan untuk “merawat” dan “mereproduksi” konstruksi masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara etnis, kultur, dan agama, tujuan tersebut dijawabantahkan melalui diwajibkannya mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta nilai moderasi beragama dalam Pendidikan Agama. Namun begitu, upaya tersebut bukan tanpa rintangan seperti: pendekatan konfesional dan mono-agama yang mendiskriminasi siswa dari agama minoritas, kualitas buku teks, hingga persoalan pendalaman dan kontekstualisasi materi yang diajarkan.

Berkaca dari hal tersebut, Universitas Satya Terra Bhinneka (ST Bhinneka) mengembangkan mata kuliah wajib “Religiusitas” dan “Inklusivitas dan Multikulturalisme”. Pada mata kuliah “Religiusitas”, mahasiswa *tidak belajar agama masing-masing*, alih-alih nilai-nilai universal lintas-agama,

sebagai upaya mendorong kesalingpahaman, empati, serta dialog lintas-agama. Sedangkan mata kuliah “Inklusivitas dan Multikulturalisme” mengajarkan mahasiswa mengenai realitas dan tantangan keberagaman, kesetaraan, keadilan sosial, hingga inklusi sosial.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis Indeks Kota Toleran (IKT) SETARA Institute serta dinamika sosial-politik yang terjadi di kota Medan dalam kurun waktu 2015 sampai 2024, terdapat sejumlah rekomendasi untuk memperkuat toleransi di kota Medan. **Pertama, diperlukan konsistensi pemerintah kota dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada inklusivitas.** Regulasi seperti peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Kehidupan Beragama harus ditindaklanjuti dengan instrumen implementatif, monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator kinerja. Sejalan dengan temuan [Wahid Foundation & LSI \(2018\)](#), kebijakan yang bersifat deklaratif tanpa instrumen implementasi berisiko tidak efektif dalam menginternalisasi nilai toleransi.

Kedua, tata kelola toleransi perlu diarahkan pada model partisipatif yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta komunitas

keagamaan. Kajian akademik menegaskan bahwa toleransi tidak dapat diproduksi secara regulasi formal saja, melainkan harus diinternalisasi melalui regulasi non formal seperti dalam [Buitrago et al. \(2019\)](#). Oleh karena itu, pemerintah kota harus mendorong terbentuknya forum-forum dialog interaktif yang mencakup pemuda, perempuan, serta kelompok rentan. Dialog yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata, seperti diskriminasi dan radikalisme, akan lebih efektif untuk dijadikan sebagai upaya meningkatkan toleran terhadap sesama.

Ketiga, pendidikan toleransi dan multikulturalisme harus diutamakan dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal. Praktik yang dilakukan oleh ST Bhinneka dapat dijadikan model pengembangan mata kuliah lintas agama, multikulturalisme, dan inklusivitas yang secara sistematis membentuk kesadaran mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki kesadaran kritis terhadap pentingnya pluralisme. Kurikulum berbasis inklusivitas dan kegiatan lintas agama diwujudkan untuk menciptakan generasi muda yang terbuka terhadap perbedaan.

Dengan mengadopsi strategi tersebut, Medan berpotensi tidak hanya meningkatkan peringkat dalam IKT, tetapi juga mengonsolidasikan dirinya sebagai ruang sosial-politik yang

merepresentasikan nilai-nilai multikulturalisme, inklusivitas, dan keadilan sosial sebagai cita-cita Medan menjadi kota toleran.

Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat instrumentalitas studi SETARA Institute dalam memotret indeks toleransi sebuah kota, yang berlandaskan dua dimensi utama: satu berhubungan dengan pemerintah (melalui regulasi dan tindakannya), yang lain berhubungan dengan sipil (dalam konteks regulasi dan demografi). Sementara dua dimensi ini menyasar “dua aktor” besar yang berperan dalam membangun realitas dan konstruksi sosial tatanan masyarakat, terutama dalam hal toleransi, kita melihat bagaimana toleransi jauh lebih kompleks daripada itu. Ada area-area yang belum tereksplorasi, sebagaimana ada pula pendekatan-pendekatan mikro yang bisa “melengkapi” pengukuran kondisi toleransi di sebuah kota.

Berkaca dari itu, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyadari peran pentingnya dalam membangun toleransi, ST Bhinneka mengembangkan mata kuliah wajib Religiusitas dan Inklusivitas & Multikulturalisme sebagai bagian dari komitmennya membangun inklusi sosial. Selain itu, kami juga mencatat beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan karena kami meyakini bahwa menghadirkan toleransi adalah tugas kompleks dan

berkelanjutan multi-aktor, baik itu individu maupun institusi.

Daftar Pustaka

- Buitrago, E. M., Caraballo, M. Á., & Roldán, J. L. (2019). Do Tolerant Societies Demand Better Institutions? Social Indicators Research, 143(3), 1161–1184. <https://doi.org/10.1007/s11205-018-2002-4>
- Damanik, F. H. S. (2024). Kehidupan multikultural di kota Medan: dinamika, tantangan, dan peluang. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 60–67.
- Grim, B. J., Finke, R., & Studies, R. (1990). International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion *. In North and Gwin. www.worldchristiandatabase.org/wcd.
- Mukmin, B. A., & Damanik, M. R. S. (2018). Demografi Politik Sumatera Utara: Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran Penduduk, Agama dan Etnis Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kota Medan. *Jurnal Geografi*, 10(2), 129–144.
- Muzakki, A. (2014). The Roots, Strategies, and Popular Perception of Islamic Radicalism in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 08(01), 1–22.
- <https://doi.org/10.15642/JIIS.2014.8.1.1-22>
- Nasution, A. (2023). *PP Gmki Kritik Gubernur Sumut seusai kejadian pembubaran Jemaat Gereja di Binjai Dan Medan*. Tribun Medan. <https://medan.tribunnews.com/2023/06/04/pp-gmki-kritik-gubernur-sumut-seusai-kejadian-pembubaran-jemaat-gereja-di-binjai-dan-medan>
- Pusat Jurnal Ilmiah Internasional Universitas Medan Area. (2022). 10 Kota Terbesar di Indonesia menurut Jumlah Populasi Penduduk. <https://pji.uma.ac.id/index.php/2022/01/31/10-kota-terbesar-di-indonesia-menurut-jumlah-populasi-penduduk/>
- S. Rajaratnam School of International Studies. (2025). Southeast Asian Social Cohesion Radar 2025 Preliminary Report: Insights from ASEAN.
- Saputra, R. E. (2018). A Fire in The Husk: Religiosity of Generation Z (Vol. 1, Issue 1).
- SETARA Institute. (2015). Tolerant City Index 2015 (Issue November).
- SETARA Institute. (2018, January 15). Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2017. SETARA Institute. <https://setara-institute.org/laporan-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-2017/>
- SETARA Institute. (2023). Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 (Issue April).

Thematic Report Vol. I

- SETARA Institute. (2024). Siaran Pers SETARA Institute INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2023.
- Tim Wahid Foundation & Lembaga Survei Indonesia. (2018). Laporan Survei Nasional Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia.
- Wexler, P. (2009). Introduction: Three Models of Social Theory in Education. In *Social Theory in Education Primer* (pp. 1–43). Peter Lang.

Thematic Report Vol. 1

Jalan Panjang Medan Menuju Kota Toleran

Thematic Report Volume 1 merupakan laporan perdana yang dirilis oleh Centre for Inclusivity, Interfaith and Multicultural Studies (CIMS), Universitas Satya Terra Bhinneka. Laporan ini hadir sebagai kajian ilmiah yang menyoroti isu-isu strategis seputar inklusivitas, hubungan lintas agama, dan kehidupan masyarakat multikultur. Setiap empat bulan sekali, CIMS akan menerbitkan laporan tematik dengan fokus isu yang berbeda.

Edisi pertama ini mengangkat tema “Jalan Panjang Medan Menuju Kota Toleran: Studi Laporan Indeks Kota Toleran SETARA Institute.” Kajian ini menelusuri dinamika Kota Medan dalam Indeks Kota Toleran selama hampir satu dekade, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi naik-turunnya peringkat, serta menawarkan rekomendasi langkah-langkah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan Medan sebagai kota yang lebih toleran dan inklusif.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Kota Medan dalam merumuskan regulasi serta kebijakan yang berpihak pada toleransi, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat luas untuk bersama-sama membangun budaya hidup yang saling menghargai dalam keberagaman.